

ANALISIS BELANJA MODAL DAN BELANJA PEMELIHARAAN PADA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

Wa Ode Rizky Saskia Pratiwi^{*1}, Ernawati Malik²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: wdrsaskiap26@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran realisasi anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan pada pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan, dengan jenis data kualitatif yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2019-2021. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data penelitian dari objek penelitian dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran realisasi anggaran belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2019-2021 bervariasi setiap tahunnya dengan besar nominal anggaran yang di realisasikan cenderung mengalami kenaikan. Berbeda dengan realisasi anggaran Belanja Pemeliharaan yang besar nominalnya mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Kesimpulan lain bahwa realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan berbeda jauh di setiap tahunnya karena meningkatnya realisasi anggaran belanja modal tidak multak di ikuti dengan meningkatnya realisasi anggaran belanja pemeliharaan, tergantung pada perencanaan anggaran pemerintah daerah dan sesuai dengan kebutuhan daerah di setiap tahunnya.

Kata Kunci : Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan, Anggaran

ABSTRACT

This study aims to determine the description of the realization of the capital expenditure and maintenance expenditure budgets in the South Buton Regency local government, with the type of qualitative data sourced from the Realization Report of the Regional Government Revenue and Expenditure Budget of the South Buton Regency for the 2019-2021 Fiscal Year. The data analysis method used is a qualitative descriptive analysis method, namely by collecting research data from the object of research and other literature. The results showed that the description of the realization of the capital expenditure budget in the regional government of South Buton Regency from 2019-2021 varied annually with the nominal amount of the realized budget tending to increase. In contrast to the realization of the Maintenance Expenditure budget, the nominal amount fluctuated during this period. Another conclusion is that the realization of capital expenditure and maintenance expenditure is significantly different each year because the increase in the realization of the capital expenditure budget is not followed by an increase in the realization of the maintenance expenditure budget, depending on local government budget planning and according to regional needs each year.

Keywords : Capital Expenditure, Maintenance Expenditure, Budget

1. PENDAHULUAN

Faktor yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah adalah tersedianya infrastruktur yang memadai. Peranan suatu infrastruktur dalam aktivitas ekonomi suatu daerah sangat penting. Beberapa fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur suatu daerah akan berjalan seiring dengan pertumbuhan output ekonomi daerah tersebut, sehingga pada saat ini setiap daerah seolah-olah sedang berlomba untuk meningkatkan pembangunan daerah.

Di Indonesia sendiri pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sehingga dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024 pemerintah memprioritaskan percepatan penyediaan kuantitas dan kualitas infrastruktur. Pemerintah juga akan melakukan beberapa usaha untuk meningkatkan kapasitas pendanaan infrastruktur, seperti review kebijakan tarif, peningkatan kapasitas fiskal dan realokasi belanja pemerintah.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Erlina, Rasdianto 2013:31). Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan serta aset tak berwujud (Erlina et. all., 2015). Pengalokasian anggaran belanja modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap daerah. Peningkatan aset pemerintah daerah ini semestinya juga memberikan meningkatkan nilai pada anggaran belanja pemeliharaan dari tahun ke tahun, walaupun ada kemungkinan peningkatan keduanya tidaklah proporsional (Rustiyaningsih, 2013).

Sedangkan Belanja Pemeliharaan ialah belanja daerah yang dialokasikan untuk menjaga dan mempertahankan aset tetap atau aset lainnya senantiasa dalam kondisi siap pakai atau normal sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya. Belanja modal tidak bersifat rutin, berbeda dengan belanja pemeliharaan yang dapat ditemukan di semua satuan/ unit kerja pemerintah karena kepemilikan aset tetap. Dengan kata lain, belanja pemeliharaan tidak tergantung pada tugas dan fungsi satuan kerja, tetapi pada jumlah aset yang dimiliki (Wahyuningrum dan Kaliwanto, 2019).

Kepentingan pemerintah dan politik legislatif dalam kaitannya dengan proses penganggaran memberikan dampak pada alokasi belanja modal terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat/ daerah, serta adanya kecenderungan dari pemerintah yang mengalokasikan belanja pemeliharaannya tidak berdasarkan pada nilai aset

tetap yang dimiliki, hal tersebut yang menjadi penyebab tak jarang peningkatan nilai belanja modal dan belanja pemeliharaan tidak proporsional (Lestari, 2021).

Kabupaten Buton Selatan merupakan salah satu daerah tingkat kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Buton Selatan atau biasa di sebut Busel terbentuk pada pertengahan Tahun 2014. Setiap daerah tentunya melakukan pengelolaan anggaran termaksud pula pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan. Dalam upaya meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mewujudkan sarana dan prasarana di wilayah daerah yang memadai, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien tentunya sangat bergantung pada tersedianya anggaran pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut aset yang berasal dari pelaksanaan APBD/ APBN merupakan bentuk dari terealisasinya Belanja Modal dalam satu tahun anggaran.

Dalam prakteknya realisasi dari belanja modal akan di ikuti dengan realisasi belanja pemeliharaan, persentase belanja modal dan belanja pemeliharaan di suatu daerah akan menjadi indeks bertambahnya aset pemerintah daerah dan akan meningkatkan perhatian pemerintah dalam memelihara aset yang telah ada. Maka dari itu, pemerintah harus memperhitungkan besarkan realisasi anggaran belanja pemeliharaan agar terdapat keseimbangan antara belanja modal dan belanja untuk pemeliharaan aset tersebut (Ariyani, K. N., & Yuliantoro, R. (2012).

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data rekening realisasi anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2019-2021 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. Menganalisis anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan merupakan salah satu cara untuk mengukur kemampuan daerah dalam memanfaatkan anggarannya. Fenomena yang terjadi realisasi anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan bervariasi setiap tahunnya, peningkatan realisasi anggaran Belanja Modal seharusnya juga menyebabkan peningkatan nominal pada realisasi anggaran Belanja Pemeliharaan dari tahun ke tahun, meskipun tidak menutup kemungkinan peningkatan kedua indikator tersebut tidak proporsional.

Hal tersebut yang menarik perhatian penulis untuk mengetahui dan menganalisis realisasi anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan pada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan pada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis gambaran realisasi anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2019-2021.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah wewenang pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam satu tahun. Anggaran pendapatan/ penerimaan dan belanja daerah akan dibuat dalam bentuk laporan akuntansi keuangan dan akan dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sama halnya menurut Sri Rustiyaningsih (2013), menyatakan bahwa penganggaran pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang berbeda, karena pihak-pihak yang terlibat dalam proses anggaran memiliki preferensi yang berbeda, maka keputusan mengenai alokasi sumber daya memerlukan proses negosiasi politik. Negosiasi yang melibatkan kepala daerah dan DPRD bergantung pada kemampuan kepala daerah untuk meyakinkan DPRD mengenai kelayakan kegiatan/ program/ proyek yang diusulkan dalam perencanaan anggaran.

2.2 Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Erlina Rasdianto (2013), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi tentang realisasi anggaran pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit dan pembiayaan/ pengeluaran dari suatu entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang akan diperbandingkan dengan target anggaran yang telah di anggarkan dalam satu periode pelaporan. Analisis anggaran belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara seekonomis, efisien dan efektif (Lontaan, I. C., & Pangerapan, S, (2016). Mahmudi (2010) berpendapat bahwa analisis belanja daerah digunakan untuk melihat seberapa efektif pemerintah daerah melakukan efisiensi fiskal, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

2.3 Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan untuk perolehan atau penambahan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah baik dalam bentuk gedung, bangunan, peralatan, infrastruktur dan aset tetap lainnya. Namun demikian, tetap didasarkan pada kebutuhan daerah dan masyarakat akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas publik maupun untuk memenuhi fasilitas umum, dan tergantung pada perencanaan anggaran pemerintah daerah setiap tahunnya.

Pengalokasian anggaran untuk belanja modal biasanya tiap tahun diadakan oleh pemerintah daerah untuk pengadaan aset tetap sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara keuangan (Amirudin, 2021). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :

a. Belanja modal tanah;

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja modal bangunan dan gedung;

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja modal aset tetap lainnya;

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja modal aset tidak berwujud;

Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.4 Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan (*maintenance expenditure*) adalah pengeluaran untuk pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya. Dari sudut pandang akuntansi, anggaran pemeliharaan dihitung dari lamanya waktu atau periode penggunaan aset tetap dan juga saat menghitung biaya penyusutan aset tetap. Artinya, jika aset tetap tersebut diperoleh pada awal tahun, maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk satu tahun, jika aset tetap tersebut diperoleh pada pertengahan tahun, maka alokasi biaya pemeliharaannya juga untuk setengah tahun (Lestari, 2021).

Timbulnya aset tetap sebagai akibat dari pelaksanaan anggaran belanja modal memiliki konsekuensi munculnya belanja pemeliharaan pada tahun berikutnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa ada beberapa belanja pemeliharaan yang memenuhi syarat sebagai belanja modal (Syaiful 2010, dalam Fitriyanti 2012), yaitu apabila :

- a) pengeluaran tersebut menghasilkan peningkatan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan kuantitas aset yang telah dimiliki; dan
- b) pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

2.5 Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan dalam Anggaran Daerah

Dalam penambahan aset tetap yang dimiliki, pemerintah daerah memberikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Pengalokasian belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah terhadap sarana dan prasarana, baik dalam kelancaran pelaksanaan

tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Maksud dari belanja modal ini untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah baik dalam bentuk peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya (Lumbanraja, 2019). Belanja modal itu sendiri di alokasikan berdasarkan pada kebutuhan masing-masing satuan/ unit kerja pada pemerintah daerah, dalam hal ini tidak semua terlibat dalam suatu kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap.

Sedangkan pada belanja pemeliharaan muncul karena semua satuan unit kerja memiliki aset tetap. Belanja pemeliharaan merupakan suatu kewajiban yang timbul berdasarkan pada realisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada agar tetap dalam kondisi yang normal tanpa memperhatikan besar atau kecil aset tersebut (Syaiful 2010 dalam Lestari 2021).

Kesimpulannya, terdapat beberapa perbedaan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan, yaitu belanja pemeliharaan bersifat rutin dan tidak tergantung pada tugas dan fungsi satuan kerja pemerintah daerah, sehingga dapat terjadi pada semua satuan kerja pemerintah daerah, karena semuanya memiliki aset tetap (Fitriyanti, 2012). Sedangkan menurut Amran Manurung dan Halomoan Sihombing (2018), belanja modal yang bersifat tidak rutin dan akan berpengaruh terhadap neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah, serta berpengaruh terhadap keuangan/finansial pemerintah dalam jangka panjang.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang tercatat pada Tahun Anggaran 2019-2021. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan tahun anggaran 2019-2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer yang di peroleh langsung dari objek penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tahapan yang paling penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah di

tetapkan. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penulis secara langsung mengunjungi objek penelitian yaitu kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Selatan untuk memperoleh, mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data guna menarik suatu kesimpulan terhadap fenomena yang ada pada penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Untuk melihat belanja modal dan belanja pemeliharaan di Kabupaten Buton Selatan untuk satu periode Rencana Strategis (Renstra), maka data dikumpulkan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Jenis-jenis akun belanja modal dan belanja pemeliharaan di Kabupaten Buton Selatan adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal

Tabel 1. Kode dan Jenis Akun Belanja Modal

Kode Akun	Jenis Akun Belanja Modal
531111	Belanja Modal Tanah
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
531115	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah
531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
532114	Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin
532116	Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin
532117	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
533117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan
534112	Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan
534114	Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
534116	Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan
534117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan
534118	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan
534121	Belanja Modal Irigasi
534122	Belanja Modal Bahan Baku Irigasi
534123	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi
534124	Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi
534125	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi
534126	Belanja Modal Perijinan Irigasi
534128	Belanja Modal Perjalanan Irigasi

Kode Akun	Jenis Akun Belanja Modal
534131	Belanja Modal Jaringan
534132	Belanja Modal Bahan Baku Jaringan
534133	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan
534135	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan
534136	Belanja Modal Perijinan Jaringan
534137	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan
534138	Belanja Modal Perjalanan Jaringan
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan
536111	Belanja Modal Lainnya
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Selatan, 2023.

Tabel 2. Rekap Realisasi Anggaran Belanja Modal

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
I	BELANJA MODAL	Target Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
	2019				
1	Tanah	5.218.350.000	3.934.805.700	(1.283.544.300)	75,40
2	Peralatan dan Mesin	33.566.349.682	31.303.285.478	(2.263.064.204)	93,26
3	Gedung dan Bangunan	55.917.540.417	53.495.335.328	(2.422.205.089)	95,67
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	62.447.927.085	59.975.488.702	(2.472.438.383)	96,04
5	Aset Tetap Lainnya	8.799.202.935	8.599.833.611	(199.369.324)	97,73
		165.949.370.119	157.308.748.819	(8.640.621.300)	94,79
	2020				
1	Tanah	5.395.000.000	2.132.060.000	(3.262.940.000)	39,52
2	Peralatan dan Mesin	56.680.115.818	26.271.353.162	(30.408.762.656)	46,35
3	Gedung dan Bangunan	109.125.646.886	64.301.311.712	(44.824.335.174)	58,92
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	81.697.584.350	55.101.048.743	(26.596.535.607)	67,45
5	Aset Tetap Lainnya	10.375.798.798	9.548.442.550	(827.356.248)	92,03
		263.274.145.852	157.354.216.167	(105.919.929.685)	59,77
	2021				
1	Tanah	640.000.000	634.408.437	(5.591.563)	99,13
2	Peralatan dan Mesin	67.988.002.867	62.304.029.707	(5.683.973.160)	91,64
3	Gedung dan Bangunan	121.561.041.691	116.302.011.658	(5.259.030.033)	95,67
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.332.229.294	38.511.814.450	(1.820.414.844)	95,49
5	Aset Tetap Lainnya	2.297.019.850	2.225.745.100	(71.274.750)	96,90
		232.818.293.702	219.978.009.352	(12.840.284.350)	94,48

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Selatan, 2023.

Pada Tabel 2 merupakan hasil penelitian tentang gambaran realisasi anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, yang di peroleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2019-2021.

Pada tahun 2019 realisasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp.157.308.748.819,- dengan besar target anggaran Rp.165.949.370.119,-. Berdasarkan data tersebut menunjukkan selisih realisasi anggaran kurang Rp.8.640.621.300 dari target anggaran. Sedangkan di tahun 2020 Anggaran Belanja Modal yang dapat di realisasikan sebesar Rp.157.354.216.167,- dengan besar target anggaran Rp.263.274.145.852,-. Berdasarkan data tersebut menunjukkan selisih realisasi anggaran kurang Rp.105.919.929.685,- dari target anggaran. Anggaran Belanja Modal yang dapat di realisasikan pada tahun 2021 sebesar Rp.219.978.009.352,- dengan

besar target anggaran Rp.232.818.293.702,-. Berdasarkan data tersebut menunjukkan selisih realisasi anggaran kurang Rp.12.840.284.350,- dari target anggaran.

Data tersebut menunjukkan bahwa nominal realisasi anggaran Belanja Modal cenderung naik dari tahun 2019-2021, namun untuk tingkat persentase realisasinya mengalami fluktuasi yaitu terjadi penurunan di tahun 2020. Sesuai dengan hasil wawancara terhadap narasumber mengenai penyebab hal tersebut, beliau mengatakan bahwa :

“Penyebab menurunnya realisasi anggaran belanja modal pada tahun 2020 dikarenakan adanya pengalihan anggaran belanja ke hutang pemerintah dan penanganan covid yang di instruksikan langsung oleh pemerintah pusat melalui kementerian keuangan sehingga pada tahun tersebut pemerintah merealisasikan anggarannya tidak sesuai dengan perencanaan yang ada, serta beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang diatur oleh perubahan peraturan ataupun perubahan perundang-undangan yang berlaku, dan kinerja dari setiap unit kerja atau OPD juga berpengaruh besar pada efisiensi realisasi anggaran di setiap tahunnya.”(wawancara, 7 Oktober 2022)

Sedangkan realisasi Belanja Modal tertinggi selama periode tersebut terjadi di tahun 2021, adapun hasil wawancara mengenai hal tersebut ialah sebagai berikut :

“Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap realisasi Belanja Modal dikarenakan anggaran yang di alokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menggunakan Dana Pinjaman baru dapat di realisasikan di tahun 2021 dan di ikuti pula dengan meningkatnya kebutuhan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada setiap unit kerja. Sehingga di tahun tersebut pemerintah baru dapat memaksimalkan realisasi anggaran untuk pembangunan daerah serta kebutuhan akan sarana dan prasarana.”(wawancara, 7 Oktober 2022)

2. Belanja Pemeliharaan

Tabel 3. Kode dan Jenis Akun Belanja Pemeliharaan

Kode Rekening	Jenis Akun Belanja Pemeliharaan
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
523131	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
523132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi
523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Selatan, 2023.

Tabel 4. Rekap Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
I	BELANJA PEMELIHARAAN	Target Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
	2019				
1	Peralatan dan Mesin	7.127.523.813	5.509.169.538	(1.618.354.275)	77,29
2	Gedung dan Bangunan	1.272.052.250	1.266.876.250	(5.176.000)	99,59
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
		8.399.576.063	6.776.045.788	(1.623.530.275)	80,67

No.	Uraian		Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
I	BELANJA PEMELIHARAAN		Target Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
	2020					
	1	Peralatan dan Mesin	6.544.872.699	5.630.936.099	(913.936.600)	86,04
	2	Gedung dan Bangunan	2.387.052.910	2.362.845.116	(24.207.794)	98,99
	3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
	4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
			8.931.925.609	7.993.781.215	(938.144.394)	89,50
	2021					
	1	Peralatan dan Mesin	5.146.630.091	4.372.478.119	(774.151.972)	84,96
	2	Gedung dan Bangunan	686.193.090	522.997.160	(163.195.930)	76,22
	3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	807.500.000	807.500.000	-	100,00
	4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
			6.640.323.181	5.702.975.279	(937.347.902)	85,88

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Selatan, 2023.

Pada Tabel 4 merupakan hasil penelitian tentang gambaran realisasi anggaran Belanja Pemeliharaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2019-2021.

Pada tahun 2019 realisasi anggaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.6.776.045.788,- dengan besar target anggaran Rp.8.399.576.063,-. Selisih realisasi anggaran tersebut kurang Rp.1.623.530.275,- dari target anggaran. Di tahun 2020 realisasi anggaran Belanja Pemeliharaan realisasi sebesar Rp.7.993.781.215,- dengan besar target anggaran Rp.8.931.925.609,-. Selisih realisasi anggaran kurang Rp.938.144.394,- dari target anggaran. Sedangkan realisasi anggaran Belanja Pemeliharaan yang dapat di realisasikan pada tahun 2021 sebesar Rp.5.702.975.279,- dengan besar target anggaran Rp.6.640.323.181,-. Selisih realisasi anggarannya kurang Rp.937.347.902,- dari target anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak La Ode Safrin, SE selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Selatan tentang Belanja Pemeliharaan, beliau mengatakan bahwa :

“Belanja Pemeliharaan adalah belanja yang bersifat rutin pada setiap unit kerja yang dialokasikan untuk menjaga dan mempertahankan aset tetap atau aset lainnya senantiasa dalam kondisi baik sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya.” (wawancara : 7 Oktober 2022)

Dapat di lihat dari tabel di atas realisasi Belanja Pemeliharaan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Sesuai dengan hasil wawancara terhadap narasumber mengenai penyebab hal tersebut, beliau mengatakan bahwa :

“Penentuan besar pengalokasian dan realisasi anggaran Belanja Pemeliharaan disetiap tahunnya tergantung dari banyak aset yang dimiliki oleh daerah dan unit kerja tetapi tidak ada ukuran atau patokan seberapa besar anggaran yang harus di anggarkan dan di

realisasikan di setiap tahunnya, tergantung pada kebutuhan daerah dan perencanaan anggaran pada unit kerja. Pemerintah juga memperhatikan kondisi dari aset-aset yang ada, apabila kondisinya masih bagus dan tidak memerlukan pemeliharaan maka unit kerja tidak akan mengusulkan ataupun merealisasikan anggaran yang di alokasikan untuk Belanja Pemeliharaan pada tahun tersebut, begitupun sebaliknya. Dengan kata lain besar anggaran Belanja Pemeliharaan ini tergantung pada kebutuhan pemerintah daerah dan kondisi aset yang ada.” (wawancara, 7 Oktober 2022)

4.2 Pembahasan

Tabel di bawah ini merupakan data persentase realisasi anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2019-2021.

1. Belanja Modal

Tabel 5. Persentase Realisasi Belanja Modal 2019-2021

Tahun	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	Pertumbuhan	
			Bertambah/ (Berkurang)	Persentase (%)
2019	165.949.370.119	157.308.748.819	(8.640.621.300)	94,79
2020	263.274.145.852	157.354.216.167	(105.919.929.685)	59,77
2021	232.818.293.702	219.978.009.352	(12.840.284.350)	94,48

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Selatan (Data diolah 2023).

Pada Tabel 5 merupakan hasil analisis data penelitian tentang gambaran kenaikan dan penurunan persentase realisasi anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. Data tersebut di peroleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2019-2021.

Dari perbandingan anggaran dan realisasi Belanja Modal yang dapat dilihat pada tabel, terlihat bahwa terdapat selisih antara realisasi dan anggaran yang ada, dimana realisasi Belanja Modal lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 terjadi selisih sebesar Rp.8.640.621.300,- atau 94,79% dari total APBD, tahun 2020 juga terjadi selisih sebesar Rp.105.919.929.685,- atau 59,77% dari total APBD dan di tahun 2021 juga terjadi selisih sebesar Rp.12.840.284.350,- atau 94,48% dari total APBD. Rata-rata persentase realisasi anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan selama tiga tahun tersebut sebesar 83,01%.

Pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan mampu memaksimalkan realisasi anggarannya dengan besar persentase 94,79% dari total APBD yang di anggarkan, karena pada tahun tersebut pemerintah fokus pada perluasan lahan dan pembangunan

kawasan perkantoran, serta pembangunan sarana dan prasarana daerah. Berbeda jauh dengan persentase tahun 2020, Pemerintah Daerah hanya mampu merealisasikan anggarannya sebesar 59,77% dari total APBD. Hal tersebut disebabkan adanya pengalihan anggaran terhadap kebijakan dan kewajiban tertentu yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, yaitu pengalihan anggaran belanja ke hutang daerah dan penanganan covid yang di instruksikan langsung oleh pemerintah pusat melalui kementerian keuangan sehingga pada tahun tersebut pemerintah merealisasikan anggarannya tidak sesuai dengan perencanaan anggaran yang ada. Sedangkan di tahun 2021, Pemerintah Daerah kembali memaksimalkan realisasi anggarannya dengan besar realisasi anggaran 94,48% dari total APBD, karena pada tahun tersebut anggaran yang di alokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menggunakan dana pinjaman baru dapat terealisasi sehingga pemerintah daerah dapat kembali memaksimalkan realisasi anggarannya untuk pembangunan sarana dan prasarana, di ikuti pula dengan meningkatnya kebutuhan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada setiap unit kerja.

2. Belanja Pemeliharaan

Tabel 6. Persentase Realisasi Belanja Pemeliharaan 2019-2021

Tahun	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	Pertumbuhan	
			Bertambah/ (Berkurang)	Persentase (%)
2019	8.399.576.063	6.776.045.788	(1.623.530.275)	80,67
2020	8.931.925.609	7.993.781.215	(938.144.394)	89,50
2021	6.640.323.181	5.702.975.279	(937.347.902)	85,88

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Selatan (Data diolah 2023).

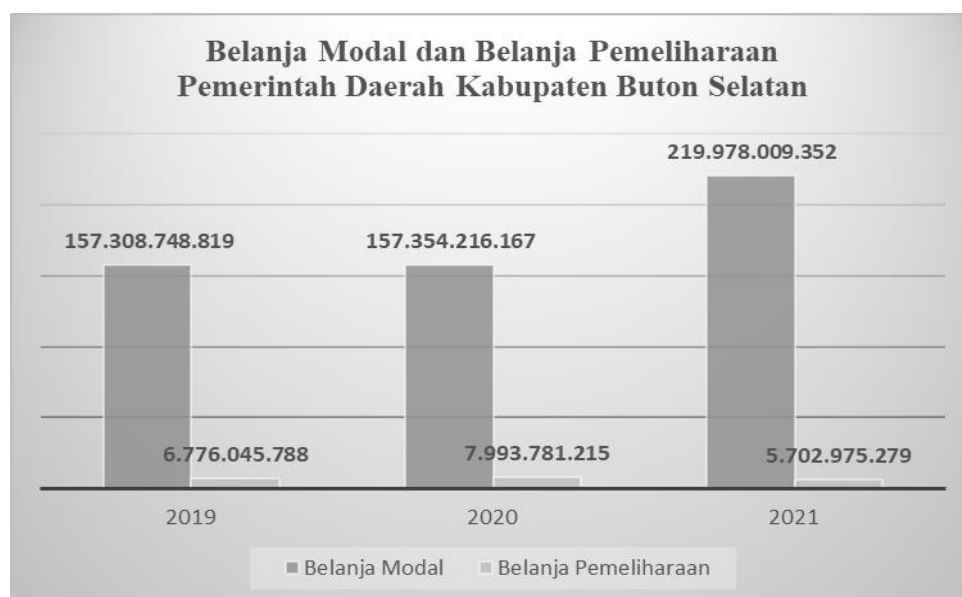
Pada Tabel 6 merupakan hasil analisis data penelitian tentang gambaran kenaikan dan penurunan persentase realisasi anggaran Belanja Pemeliharaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. Data tersebut di peroleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2019-2021.

Dari tabel di atas dapat di lihat adanya perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan dengan terjadinya selisih, dimana Belanja Pemeliharaan yang direalisasikan lebih kecil dari anggaran belanja yang ditetapkan pada APBD. Pada tahun 2019 terjadi selisih sebesar Rp.1.623.530.275,- atau 80,67% dari total APBD, tahun 2020 juga terjadi selisih sebesar Rp.938.144.394,- atau 89,50% dari total APBD dan di tahun 2021

terjadi selisih sebesar Rp.937.347.902,- atau 85,88% dari total APBD. Rata-rata persentase realisasi anggaran Belanja Pemeliharaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan selama tiga tahun tersebut sebesar 83,35%.

Walaupun pengalokasian Belanja Pemeliharaan bersifat rutin tetapi untuk realisasi setiap tahunnya tetap bergantung pada kondisi aset yang dimiliki daerah dan unit kerja. Hal inilah yang menjadi alasan besarnya realisasi anggaran belanja pemeliharaan pada tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi karena tidak semua aset-aset di tahun berjalan dan tahun berikutnya menimbulkan Belanja Pemeliharaan, apabila kondisinya masih baik dan tidak memerlukan pemeliharaan maka unit kerja tidak akan mengajukan ataupun merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan untuk Belanja Pemeliharaan pada tahun tersebut, begitupun sebaliknya tergantung dari kondisi aset, kebutuhan daerah dan perencanaan anggaran di unit kerja perangkat daerah.

3. Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan



Sumber : Data diolah 2023.

Gambar 1. Grafik Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan

Grafik diatas merupakan hasil penelitian mengenai realisasi anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2019-2021 yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah dan telah masuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran realisasi anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2019-2021 bervariasi setiap tahunnya dengan besar nominal anggaran yang di realisasikan cenderung mengalami kenaikan. Berbeda dengan realisasi anggaran Belanja Pemeliharaan yang besar nominalnya mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Realisasi anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan berbeda jauh di setiap tahunnya karena meningkatnya realisasi anggaran Belanja Modal tidak multak di ikuti dengan meningkatnya realisasi anggaran Belanja Pemeliharaan, tergantung pada perencanaan anggaran pemerintah daerah dan sesuai dengan kebutuhan daerah di setiap tahunnya. Namun untuk Belanja Pemeliharaan walaupun sifatnya rutin tetapi tetap tergantung pada kondisi dari aset-aset daerah yang telah di peroleh dari Belanja Modal, karena tidak semua aset di tahun berjalan dan tahun berikutnya menimbulkan Belanja Pemeliharaan. Jadi tidak ada ukuran atau patokan seberapa besar anggaran tersebut harus di anggarkan dan di realisasikan setiap tahunnya, tergantung pada kebutuhan daerah dan perencanaan anggaran pada unit kerja.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam menyusun anggaran belanja daerah. Walaupun kemungkinan besar terdapat kekurangan dalam perencanaan anggaran sehingga perkiraan dalam pengalokasian anggaran belanja kurang akurat atau anggaran tersebut tidak terealisasi secara maksimal. Hal tersebut bisa jadi disebabkan oleh program dan kegiatan yang tidak terlaksana walaupun sudah direncanakan dalam penyusunan anggaran, yang pada intinya memungkinkan anggaran tersebut dialihkan pada pos-pos pengeluaran/belanja yang masih kurang atau alokasi anggaran tertentu dialihkan pada pengeluaran/belanja lain yang prioritasnya lebih penting sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada.

5. KESIMPULAN

Hasil analisis data penelitian mengenai gambaran realisasi anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2019-2021 bervariasi setiap tahunnya dengan besar nominal anggaran yang di realisasikan cenderung mengalami kenaikan. Berbeda dengan realisasi anggaran Belanja Pemeliharaan yang besar nominalnya mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan berbeda jauh di setiap tahunnya karena meningkatnya realisasi anggaran belanja modal tidak multak di ikuti dengan meningkatnya realisasi anggaran belanja

pemeliharaan, tergantung pada perencanaan anggaran pemerintah daerah dan sesuai dengan kebutuhan daerah di setiap tahunnya.

6. SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan harus terus memperhatikan perencanaan dan pengalokasian anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan agar alokasinya tidak menyimpang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah guna mewujudkan sarana dan prasana di daerah yang memadai.
2. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Selatan dalam penyusunan anggaran belanja baik itu belanja modal maupun belanja pemeliharaan, hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi daerah, agar anggaran yang sudah disusun dapat direalisasikan dengan baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam meneliti dan menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah yang berkaitan dengan belanja daerah khususnya belanja modal dan belanja pemeliharaan secara lebih mendetail, sehingga selalu ada perubahan dan peningkatan perbaikan ke arah yang lebih baik.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, K. N., & Yulianto, R. 2012. Analisis Pengaruh Sumber Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Pengaruh Belanja Modal Terhadap Belanja Pemeliharaan Dalam Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006-2010. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit*, 1(1), 47-64.
- Erlina, Rasdianto, 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*, Medan : Brama Ardian.
- Erlina., Rambe, O.S., dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta : Salemba Empat.
- Fitriyati, F. 2012. *Analisis Hubungan Belanja Modal Dan Belanja Pemeliharaan Pada Anggaran Pemerintah Daerah* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Lestari, R. 2021. *Analisis Hubungan Belanja Modal Dengan Belanja. Pemeliharaan Pada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar*.

- Lontaan, I. C., & Pangerapan, S. 2016. Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Lumbanraja, R. M. 2019. Analisis Hubungan Belanja Modal Dengan Belanja Pemeliharaan Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Kedua, Cetakan Pertama*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Hal 156.
- Manurung, Amran dan Halomoan Sihombing. 2018. Analisis Laporan Keuangan (Sektor Swasta dan Pemerintahan Daerah), Universitas HKBP Nommensen, Medan, Hal. 246.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Rustiyaningsih, S. 2013. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Belanja Pemeliharaan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Jawa Timur). *Widya Warta: Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik : Penerbit Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Syaiful. 2010. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan.
- W, Harini & Kaliwanto, B. 2019. *Analisis Korelasi Antara Belanja Modal Terhadap Belanja Pemeliharaan Batan Tahun 2015-2019*.